

## KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

- Model Penetapan Pajak Properti berdasarkan Jarak Garis Lurus dan Jarak Jalanan ; Studi Kasus di Bogor Barat
- Analisis Kemampuan Bayar Masyarakat dalam Program Asuransi Bencana
- Penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Menimbulkan Risiko Fiskal
- Model Proyeksi Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) Bulanan dengan Metode ARIMA
- Analisis Pertumbuhan PDB, Penerimaan Pajak dan Insentif Pajak Bagi Industri Manufaktur

Kaj Eko & Keu.	Vol. 18	No. 1	Maret 2014	Halaman 1 - 82	ISSN 1410-3249
----------------	---------	-------	------------	----------------	----------------

# ANALISIS PERTUMBUHAN PDB, PENERIMAAN PAJAK DAN INSENTIF PAJAK BAGI INDUSTRI MANUFAKTUR

## *Analysis of GDP Growth, Tax Revenue and Tax Incentive for The Manufacturing Industry*

**Benny Gunawan Adriansyah**

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan  
Jln. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat 10710, DKI Jakarta, Indonesia  
Email: bennygunawan.adriansyah@gmail.com

Naskah diterima: 25 November 2013

Naskah direvisi: 14 Februari 2014

Disetujui diterbitkan: 6 Maret 2014

### **ABSTRACT**

*There is a positive correlation between GDP growth and tax revenue growth, but those accelerated is not the same. Indonesian tax ratio still remain low and there is presumption that tax revenue growth is slower than the GDP growth. Meanwhile, Indonesia faces a trend decline in the performance of manufacturing industry, so the study also conducted an analysis of tax incentives manufacturing sector. Quantitative approach to develop mathematical models and the decomposition of data combined with the structure of GDP and industry, including the tax burden. The result shows that tax revenue growth in Indonesia fluctuated to GDP growth. In 2005, 2007, 2008 and 2011 Indonesia's tax revenue growth is faster than the growth of GDP, but contrary to the year of 2006, 2009 and 2010. Mainly, the tax revenue growth of the manufacturing industry sector is slower than the GDP growth. Tax incentives for the manufacturing industry sector has no relationship with the variables that should be calculated. The variables are the share of GDP, value added, employment and number of businesses player. That's why, the recommendation of tax incentives addressed to certain objectives.*

*Keywords: GDP growth, share to GDP, tax burden ratio, tax incentives, tax revenue growth*

### **ABSTRAK**

Korelasi positif antara pertumbuhan PDB dan pertumbuhan penerimaan pajak tidak berarti bahwa percepatan pertumbuhannya akan sama. Salah satu dugaan rendahnya *tax ratio* Indonesia adalah pertumbuhan penerimaan pajak lebih lambat dibandingkan pertumbuhan PDB. Selain itu, Indonesia juga menghadapi trend penurunan kinerja industri manufaktur, sehingga penelitian juga melakukan analisis pemberian insentif pajak sektor industri manufaktur. Pendekatan kuantitatif dengan melakukan pengembangan model matematika dan dekomposisi data-data yang berhubungan dengan struktur PDB dan industri, termasuk *tax burden*. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia bersifat fluktuatif terhadap pertumbuhan PDB. Pada tahun 2005, 2007, 2008 dan 2011 pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDB sedangkan tahun 2006, 2009 dan 2010. Sementara itu, sebagian besar pertumbuhan penerimaan pajak sektor industri manufaktur lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan PDB. Fasilitas insentif bagi sektor industri manufaktur tidak berhubungan dengan variabel-variabel yang seharusnya diperhitungkan yaitu *share*

terhadap PDB, nilai tambah bruto, penyerapan tenaga kerja dan jumlah pelaku usaha. Untuk itu, insentif pajak direkomendasikan untuk diarahkan langsung kepada tujuan yang ingin dicapai.

Kata Kunci: insentif pajak, kontribusi terhadap PDB, pertumbuhan PDB, pertumbuhan penerimaan pajak

JEL Classification: E 62, F14, H11

## I. PENDAHULUAN

Nota Keuangan APBN tahun 2014 menyebutkan bahwa tantangan dan peluang kebijakan pendapatan negara diperkirakan semakin kompleks. Sementara itu, tuntutan kebutuhan alokasi anggaran diperkirakan semakin meningkat sebagai persiapan babak akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009 - 2014. Kedua pernyataan tersebut akan terus berulang setiap tahun sejalan dengan bergulirnya siklus APBN, bagaimana memaksimalkan pendapatan untuk menutupi bertambahnya pengeluaran negara. Meskipun tingkat defisit APBN masih terjaga pada level di bawah 2.5% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tetapi cenderung disebabkan pemerintah belum berani terlalu ekspansif atau adanya penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Akibat kehati-hatian tersebut, Indonesia mungkin kehilangan momentum untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dan mewujudkan visi Indonesia 2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Sementara itu, reformasi perpajakan, yang telah berlangsung selama tiga dekade, menjadikan kontribusi penerimaan perpajakan tidak terbantahkan. Selama periode 2004 - 2013 terjadi peningkatan kontribusi dari kisaran 70% menjadi 78% untuk semua jenis pajak (baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional). Direktorat Jenderal Pajak memegang peranan dalam mengelola penerimaan pajak pusat (sekitar 85% - 95%) dalam bentuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi penurunan kontribusi menjadi hanya sebesar 85%. Hal ini dapat dilihat dari angka *tax ratio* Indonesia yang mengalami sedikit penurunan dari 12,34 % (tahun 2004) menjadi sebesar 11,47% (tahun 2013). Secara nominal terdapat lonjakan penerimaan pajak selama kurun waktu satu dasawarsa terakhir (tahun 2004 - 2013) sebesar 382% dari Rp 280,6 triliun menjadi Rp 1.071,71 triliun. Sedangkan nilai nominal Produk Domestik Bruto Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan dari Rp 2.296 triliun menjadi Rp 9.084 triliun atau meningkat 396% dalam kurun waktu yang sama. Berdasarkan perbandingan prosentase peningkatan tersebut terlihat bahwa pertumbuhan PDB secara nominal lebih cepat dibandingkan penerimaan pajak untuk periode 2004 - 2013.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil sejak tahun 1999 memang telah meningkatkan pendapatan per kapita menjadi Rp 36,5 juta pada tahun 2013 (mencapai US \$ 3,000). Dengan demikian, Indonesia sudah termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah, meskipun masih berada pada tingkatan *low-middle income*. Meskipun telah melakukan perbaikan kinerja penerimaan perpajakan, tetapi masih banyak pengamat yang mempertanyakan rendahnya pencapaian *tax ratio*. Dalam APBN-Perubahan tahun 2014 disebutkan bahwa target pencapaian *tax ratio* tahun 2013 hanyalah sebesar 12,38%. Teori umum menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara pertumbuhan PDB dan pertumbuhan penerimaan pajak, yang berarti kenaikan PDB akan selalu diikuti kenaikan penerimaan pajak. Akan tetapi, percepatan kenaikannya tidak selalu sama, bisa lebih kecil atau lebih besar. Salah satu dugaan rendahnya *tax ratio* Indonesia diakibatkan karena pertumbuhan penerimaan pajak lebih lambat dibandingkan pertumbuhan PDB. Hal tersebut merupakan pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni "bagaimanakah kecepatan pertumbuhan PDB Indonesia dibandingkan dengan kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak?"

Selain itu, penelitian ini juga akan mencoba melakukan analisa terhadap insentif pajak yang diberikan kepada sektor industri pengolahan/manufaktur. Sektor ini merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sektor industri manufaktur merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional dan mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Tingginya beban pajak pada sektor ini dianggap tidak mendukung industri yang tangguh dan akibatnya produk manufaktur Indonesia tidak memiliki daya saing tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada periode 2000-2011 berupa kecenderungan penurunan pangsa ekspor produk manufaktur dari 57% menjadi hanya 34%. Sedangkan, nilai impor terus melonjak karena adanya kekosongan produk manufaktur selain karena lemahnya daya saing. Dorongan tersebut membuat pemerintah memberikan berbagai bentuk insentif pajak untuk sektor industri manufaktur. Akan tetapi, berbagai bentuk insentif pajak yang telah dikeluarkan pemerintah dituding tidak memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi justru memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut kemudian akan dibahas juga dalam penelitian ini untuk melakukan analisa pemberian insentif pajak bagi sektor industri pengolahan/manufaktur.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai efisiensi struktur pajak Indonesia sudah pernah dilakukan sebelum reformasi perpajakan. Hasil penelitian Uppal (1986) menunjukkan bahwa (a) struktur pajak Indonesia belum efisien untuk digunakan sebagai alat memobilisasi dana domestik dari sektor swasta ke sektor politik, dan (b) struktur pajak belum efisien digunakan sebagai alat yang fleksibel untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi makro. Sementara itu, Arnold (2013) menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil mengembangkan sistem perpajakan, baik dalam peningkatan penerimaan perpajakan dan efisiensi administrasi, selama lebih dari satu dekade meskipun *tax ratio*-nya masih rendah. *Tax ratio* Indonesia dalam kurun waktu 2003-2013 menunjukkan stagnasi pada level antara 11% s.d 12,5%, walaupun jauh meningkat dibandingkan pada saat awal reformasi perpajakan tahun 1985-1986 yang berada di kisaran 5%. Sebagian besar pengamat perpajakan berpendapat bahwa jika tidak dilakukan perubahan yang signifikan maka *tax ratio* tersebut tidak akan banyak berubah. Martines-Vazques (2001) mencontohkan dalam kasus di Meksiko yang menunjukkan terjadinya stagnasi *tax ratio* selama kurun waktu 1980 - 2004 yang berada di kisaran 10,1% s.d 10,2%. Dibandingkan dengan emerging countries lainnya, maka bisa dikatakan *tax ratio* Indonesia masih berada di level yang termasuk rendah. Perbandingan data World Bank untuk periode 2004 - 2008 menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia lebih baik dibandingkan China (sekitar 8,7% - 10,3%) dan India (9,4% - 11,9%), tetapi lebih buruk dibandingkan Brazil (15,9% - 16,7%), Rusia (13,2% - 16,6%) atau bahkan Afrika Selatan (25,3% - 28,9%)

Bird, Martinez-Vazquez dan Torgler (2008) memberikan hasil analisa yang menarik bahwa peningkatan penerimaan pajak melalui pengembangan institusi dalam bentuk peningkatan akuntabilitas dan pengurangan korupsi akan lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan melakukan perubahan struktur ekonomi. Sedangkan Gordon dan Li (2008) mengemukakan bahwa pembayar pajak akan memilih untuk tidak menggunakan institusi keuangan (terutama bank) untuk menghindari pengenaan pajak. Dengan demikian, peranan bank untuk meningkatkan penerimaan pajak sangat penting dan hal ini akan sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah menyangkut pajak. Dalam melakukan analisa pertumbuhan PDB dibandingkan dengan penerimaan pajak, maka terdapat pendekatan sebagaimana dikemukakan oleh Watada, Wu dan Xu (2014). Terdapat dua teori umum dalam berbagai penelitian tentang penerimaan pajak, yaitu *the theory of three factors* dan *the theory of six factors*. *The theory of three factors* menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang merupakan faktor untuk meningkatkan penerimaan pajak, yakni pertumbuhan ekonomi, penyesuaian kebijakan serta peningkatan *cost of*

*collection* dan administrasi pajak. Sementara itu, *the theory of six factors* menggunakan variabel yang lebih banyak yakni pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga, struktur PDB dan penerimaan pajak, sistem pajak progresif, *peningkatan cost of collection* dan administrasi pajak serta dampak kegiatan ekspor-impor terhadap kenaikan PDB dan penerimaan pajak.

Sektor yang menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia adalah sektor manufaktur dengan kontribusi lebih dari 35% meskipun kontribusi industri manufaktur hanya menyumbang kurang lebih sebesar 25% terhadap PDB. Sektor industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini tidak saja berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi struktural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing nasional. Adanya keinginan untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi dalam industri pengolahan, maka pemerintah memberikan berbagai bentuk insentif pajak untuk sektor ini. Menurut Downing (2004), terdapat dua tipe program insentif yang diberikan oleh pemerintah. Tipe pertama berupa *entitlement*, yaitu insentif pajak diberikan kepada proyek berdasarkan kriteria atau formula tertentu, misalnya jumlah penciptaan lapangan pekerjaan, nilai penanaman modal baru atau jumlah pajak yang akan dihasilkan. Sedangkan tipe kedua *discretionary*, yaitu insentif diberikan berdasarkan proyek-proyek yang memenuhi syarat-syarat tertentu misalnya persaingan usaha yang ketat, kesenjangan ekonomi antar wilayah, kualitas lapangan pekerjaan yang disediakan, potensi pertumbuhan perusahaan, manfaat fiskal bagi pemerintah, tingkat tekanan ekonomi di wilayah proyek atau kesediaan menyediakan pekerjaan bagi orang-orang berkebutuhan khusus. Easson dan Zolt (2003) mengemukakan bahwa mekanisme pemberian insentif pajak dipengaruhi oleh berbagai macam pertimbangan, yaitu jenis kepemilikan investasi, jenis investasi (investasi baru atau yang telah ada), target sektor yang memperoleh insentif pajak, lokasi, penciptaan lapangan pekerjaan, alih teknologi atau pengembangan ekspor. Salah satu pertanyaan yang krusial adalah tentang efektifitas pemberian insentif pajak.

James (2009) menyatakan bahwa tingkat pajak penghasilan yang rendah hanya sedikit mempengaruhi investasi di negara-negara yang memiliki iklim investasi yang lemah. Kebijakan insentif seharusnya diberikan jika negara tersebut telah siap dan terdapat lingkungan bisnis yang memadai. Mooij dan Enderveen (2004) serta Desai, Foley dan Hines (2004) menyimpulkan bahwa investasi di negara-negara maju (*developed countries*) sangat cepat merespon adanya insentif dan kemungkinan menjadi sangat efektif. Sedangkan Klemm dan Van Parys (2009) menyatakan bahwa investasi di beberapa negara berkembang (*developing countries*) tidak merespon adanya insentif sehingga keberadaan insentif pajak berdampak kecil terhadap investasi. Hasil penelitian Grubert dan Mufti (1991) serta Rolfe dan White (1990) menunjukkan bahwa investasi yang berorientasi ekspor lebih sensitif dengan adanya insentif pajak dan menyimpulkan bahwa insentif untuk target yang telah ditentukan akan menjadi sangat efektif. Berbagai penelitian di atas menunjukkan bahwa insentif pajak akan menjadi sangat efektif jika dirancang dengan sangat baik dan kondisi perekonomian sudah sangat mapan.

Saat ini, hampir semua negara *developing countries* sudah menerapkan berbagai insentif pajak untuk mendorong investasi asing (*Foreign Direct Investment/FDI*). Tung dan Co (2000) menyimpulkan bahwa insentif pajak merupakan sarana yang efektif dalam meningkatkan FDI yang masuk ke China. Asafu-Adjaye (2000) menyimpulkan bahwa bagaimanapun juga FDI memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, Wells (2001) menyatakan bahwa beberapa negara memberikan insentif pajak tanpa memperhitungkan berapa nilai *cost*-nya. Negara-negara tersebut beranggapan akan *mengalami lost investment* tanpa adanya insentif pajak, sementara negara-negara pesaingnya tetap memberikan iming-iming berupa insentif pajak. Hasil penelitian Fletcher (2002) atas pemberian insentif pajak di Kamboja, Laos dan Vietnam akan menghasilkan *cost*

yang cukup besar, misalnya di Vietnam bisa mencapai lebih dari 0.7 persen PDB. Penemuan lainnya juga membuktikan bahwa insentif pajak bukan determinan utama yang akan meningkatkan nilai investasi dan jika diperlukan, lebih baik dalam bentuk depresiasi dipercepat (*accelerated depreciation*) dibandingkan dengan *tax holiday*. Hasil tersebut sejalan dengan temuan Fahmi (2012) yang membuktikan bahwa fasilitas *tax holiday* tidak signifikan pengaruhnya untuk menarik FDI ke Indonesia, karena fasilitas tersebut tidak akan pernah mengesampingkan kebutuhan utama investor yakni infrastruktur, stabilitas ekonomi dan politik serta kebijakan pemerintah yang kuat.

### III. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang berawal dari beberapa konsep dan teori yang digunakan sebagai dasar untuk membuat suatu hipotesa, dan dilakukan secara sistematis untuk menemukan suatu fenomena serta korelasinya. Secara umum, metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersifat noneksperimental berupa pendekatan deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat untuk memberikan gambaran yang jelas tentang PDB dan penerimaan pajak dengan pendekatan detail dilihat dari setiap sektor ekonomi. Selanjutnya dilakukan analisa yang bersifat sangat spesifik, yaitu analisis tentang pemberian insentif pajak bagi sektor industri pengolahan/ manufaktur. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar adalah data kuantitatif berupa angka-angka. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Keuangan (terutama Direktorat Jenderal Pajak), Biro Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perindustrian.

Hipotesa yang dibangun dalam penelitian ini merupakan hasil elaborasi fenomena korelasi antara pertumbuhan penerimaan pajak dan pertumbuhan PDB. Perdebatan tentang hubungan kedua variabel tersebut terus berlangsung sampai dengan saat ini. Korelasinya dapat bersifat positif yang berarti bahwa pertumbuhan PDB akan diikuti pertumbuhan penerimaan pajak (Gacanja, 2012). Bahkan pertumbuhan penerimaan pajak di China lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDB-nya (Yi dan Suyono, 2013). PDB yang digunakan dengan pendekatan metode produksi, yaitu cara penghitungan dengan menjumlahkan nilai tambah (*value added*) sektor-sektor produksi (industri) dalam suatu perekonomian. Setiap sektor tersebut akan memberikan kontribusi terhadap PDB maupun pembayaran pajak, maka bisa dihitung *tax burden ratio*-nya. Selain itu, penelitian ini menggunakan nilai nominal atas PDB dan jumlah pembayaran pajak setiap sektor. *Share* terhadap PDB dan *tax burden ratio* merupakan hasil penghitungan rata-rata untuk periode 2004 – 2011.

Penjumlahan *tax burden ratio* seluruh sektor industri akan menghasilkan *macro tax burden ratio* atau dapat dinyatakan dengan model persamaan matematika sebagai berikut :

$$t_n = f(t_{in}, s_{in}, \dots) = \sum_{i=1}^3 t_{in} s_{in} \quad \text{dan} \quad \sum_{i=1}^3 s_{in} = 1 \quad (1)$$

di mana  $t_n$  : *macro tax burden ratio* pada tahun n,  
 $t_{in}$  : *macro tax burden ratio* pada tahun n dan sektor i.  
 $s_{in}$  : *share* sektor i terhadap PDB pada tahun n.

Sektor terdiri dari tiga kelompok, yaitu primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya dalam pembahasan sektor primer dibagi menjadi dua, yaitu sektor pertanian dan pertambangan/penggalan. Sedangkan sektor sekunder (industri pengolahan/manufaktur) juga dibagi menjadi dua, yaitu sektor industri pengolahan migas dan pengolahan non-migas. Sedangkan sektor tersier merupakan penggabungan seluruh sektor-sektor jasa.

Dari persamaan (1) diperoleh dari pembuktian berikut ini :

$$t_n = \frac{\sum_{i=1}^3 T_{in}}{PDB_n} = \sum_{i=1}^3 \frac{T_{in}}{PDB_n} = \sum_{i=1}^3 \frac{T_{in}}{PDB_{in}} \times \frac{PDB_{in}}{PDB_n} = \sum_{i=1}^3 t_{in, sin} \quad (2)$$

di mana  $T_{in}$  : *macro tax ratio* suatu sektor  $i$  pada tahun  $n$   
 $PDB$  : nilai tambah (*value added*) tiga kelompok sektor pada tahun  $n$ .

Dengan demikian, *macro tax burden ratio* dihasilkan dari penjumlahan *tax burden ratio* dengan *share* terhadap PDB masing-masing sektor industri. Atau dapat dikatakan bahwa *macro tax burden ratio* adalah penjumlahan rata-rata tertimbang (*weighted average*) dari *tax burden ratio* dengan *share* terhadap PDB masing-masing sektor industri. Dari persamaan (2) diketahui bahwa  $t_n$  diperoleh dari pembagian *macro tax ratio* pada tahun  $n$  dengan PDB pada tahun  $n$  atau dinyatakan dengan :

$$t_n = \frac{T_n}{PDB_n}$$

Jika dilakukan diferensial maka  $\partial \left( \frac{T}{PDB} \right) = \frac{(PDB \cdot \partial T) - (T \cdot \partial PDB)}{PDB^2}$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\partial t}{t} &= \frac{\partial \left( \frac{T}{PDB} \right)}{\frac{T}{PDB}} = \frac{(PDB \cdot \partial T) - (T \cdot \partial PDB)}{PDB^2} \times \frac{PDB}{T} \\ &\approx \frac{\Delta T}{T} - \frac{\Delta PDB}{PDB} \end{aligned} \quad (3)$$

Persamaan (3) membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan makro adalah selisih antara tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dengan pertumbuhan PDB atau dapat dinyatakan dengan

$$\frac{\Delta t}{t} = \frac{\Delta T}{T} - \frac{\Delta PDB}{PDB} \quad (4)$$

Teorema 1 menyatakan bahwa jika pertumbuhan penerimaan pajak lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB, maka pertumbuhan *macro tax burden ratio* lebih besar daripada nol ( $t_n > 0$ ) sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\frac{\Delta T_n}{T_{n-1}} > \frac{\Delta PDB_n}{PDB_{n-1}} \iff \frac{\Delta t_n}{t_{n-1}} > 0 \quad (5)$$

Persamaan (5) dapat dibuktikan dengan perhitungan matematika sebagai berikut :

$$\text{Jika } \frac{\Delta T_n}{T_{n-1}} > \frac{\Delta PDB_n}{PDB_{n-1}} \text{ atau } \frac{\Delta T_n}{T_{n-1}} - \frac{\Delta PDB_n}{PDB_{n-1}} > 0$$

$$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} - \frac{PDB_n - PDB_{n-1}}{PDB_{n-1}} > 0$$

$$\frac{T_n}{T_{n-1}} - \frac{PDB_n}{PDB_{n-1}} > 0$$

$$T_n PDB_{n-1} - T_{n-1} PDB_n > 0, \text{ dibagi dengan } PDB_n PDB_{n-1}$$

$$\text{diperoleh } \frac{T_n}{PDB_n} - \frac{T_{n-1}}{PDB_{n-1}} > 0 \quad (6)$$

$$\text{Jika persamaan (6) dibagi dengan } t_{n-1} = \frac{T_{n-1}}{PDB_{n-1}} \text{ dan } \Delta t_n = \frac{T_n}{PDB_n} - \frac{T_{n-1}}{PDB_{n-1}}$$

$$\text{maka diperoleh } \frac{\Delta t_n}{t_{n-1}} > 0$$

Teorema 2 menyatakan bahwa jika pertumbuhan *macro tax burden ratio* lebih besar daripada nol ( $t_n > 0$ ), berarti penjumlahan dua variabel turunannya lebih besar daripada nol. Dua variabel turunan tersebut, yaitu pertama *real tax burden ratio* tiap industri ditambah selisih kenaikan *share*-nya terhadap PDB dan variabel kedua *relative share* tiap industri terhadap PDB ditambah kenaikan *real tax burden ratio* -nya atau dinyatakan dengan :

$$\partial t_n > 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^3 \sin \cdot \Delta tin + \sum_{i=1}^3 tin \cdot \Delta sin = \sum_{i=1}^3 (tin \cdot sin + sin \cdot \Delta tin) > 0 \quad (7)$$

Karena mensyaratkan adanya kenaikan maka teorema 2 hanya berlaku jika pertumbuhan kenaikan penerimaan pajak lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDB (atau  $t_n > 0$ ).

Persamaan (7) diperoleh dari diferensial persamaan (1), yaitu :

$$\partial t_n = \sum_{i=1}^3 f' tin \cdot \Delta tin + \sum_{i=1}^3 f' sin \cdot \Delta sin$$

$$\partial t_n = \sum_{i=1}^3 sin \cdot \Delta tin + \sum_{i=1}^3 tin \cdot \Delta sin$$

$$= \sum_{i=1}^3 (tin \cdot sin + sin \cdot \Delta tin)$$

$$\therefore \partial t_n > 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^3 sin \cdot \Delta tin + \sum_{i=1}^3 tin \cdot \Delta sin > 0$$

Dengan demikian, teorema 1 dan 2 dapat dibuktikan sehingga dapat disimpulkan bahwa :

$t_n > 0$  jika pertumbuhan penerimaan pajak lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB dan penjumlahan dua variabel turunannya lebih besar daripada nol.

Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis atas pemberian insentif pajak dengan pendekatan sektor industri. Variabel-variabel yang dipertimbangkan dalam insentif pajak adalah *share* terhadap PDB, *tax burden ratio*, nilai tambah bruto, penyerapan tenaga kerja dan jumlah pelaku usaha. *Share* terhadap PDB dan *tax burden ratio* merupakan hasil penghitungan rata-rata untuk periode 2004 – 2011, sedangkan nilai tambah bruto, penyerapan tenaga kerja dan jumlah pelaku usaha merupakan perbandingan setiap sub sektor industri dengan kontribusi yang diberikan oleh industri manufaktur. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak, Biro Pusat Statistik dan Kementerian Perindustrian.

#### IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Pertumbuhan PDB dan Penerimaan Pajak

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, penelitian ini akan membagi PDB dalam tiga kelompok, yaitu primer, sekunder dan tersier. Sektor primer terdiri dari dua, yaitu sektor pertanian (selanjutnya disebut primer-1) dan pertambangan/penggalian (selanjutnya disebut primer-2); sektor sekunder (industri pengolahan/manufaktur) juga dibagi menjadi dua, yaitu sektor industri pengolahan migas (sekunder-1) dan pengolahan non-migas (sekunder 2) serta sektor tersier merupakan sektor jasa. Hasil penghitungan akan dibahas berikut ini :

##### 4.1.1. Sektor Primer

Krugman (2000) berpendapat bahwa perekonomian negara berkembang umumnya mengarah ke *dual economy*, yaitu berkembangnya sektor yang relatif modern dengan karakteristik *capital intensive* dan *high-wage* tetapi peranan sektor pertanian yang bersifat tradisional masih cukup besar. Sebagaimana negara berkembang lainnya, Indonesia peranan sektor pertanian masih sangat penting terutama memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduknya. Berdasarkan data BPS diketahui bahwa peranan sektor pertanian (termasuk pertanian dan peternakan, kehutanan dan perikanan) masih cukup penting tetapi tidak mutlak lagi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1. Sementara itu, penerimaan pajak dari sektor pertanian sangat kecil dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuatif.

**Tabel 4.1.** Hasil Penghitungan Sektor Primer-1 (Pertanian)

Tahun	Tax Burden Ratio Sektor Primer-1 ( $t_{in}$ )	Share Sektor Primer-1 terhadap PDB ( $S_{in}$ )	Pertumbuhan $S_{in}$ ( $\Delta S_{in}$ )	Pertumbuhan $t_{in}$ ( $\Delta t_{in}$ )	$\sum t_{in} = (t_{in} \times \Delta S_{in}) + (S_{in} \times \Delta t_{in})$
2004	0.22	14.34			
2005	0.20	13.13	(0.08)	-0.07	(0.92)
2006	0.24	12.97	(0.01)	0.19	2.44
2007	0.11	13.72	0.06	-0.54	(7.38)
2008	0.08	14.48	0.06	-0.26	(3.71)
2009	0.07	15.29	0.06	-0.16	(2.52)
2010	0.08	15.31	0.00	0.11	1.69
2011	0.10	14.70	(0.04)	0.27	4.00

Sumber : Hasil penghitungan

Sesuai dengan hasil penghitungan pada Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa sektor primer-1 bukan merupakan sektor yang tepat untuk diberikan beban pajak yang tinggi mengingat karakteristiknya yang sangat padat karya dan berlakunya *decreasing return to scale*. Oleh karena itu, dalam periode 2005-2011 tersebut sebagian besar pertumbuhan penerimaan pajak lebih lambat dibandingkan pertumbuhan PDB.

Akan tetapi, hal tersebut berlawanan dengan sektor primer-2. Indonesia dikenal memiliki kekuatan sumber daya alam, dan hal ini terlihat dari peranan sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDB. Masih tingginya harga komoditas sektor ini (karena *supply* yang cenderung berkurang), membuat kontribusi sektor primer-2 terhadap PDB masih tetap tinggi. Hasil penghitungan pertumbuhan penerimaan pajak maupun pertumbuhan PDB sektor primer-2 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 4.2.** Hasil Penghitungan Sektor Primer-2 (Pertambangan dan Penggalian)

Tahun	Tax Burden Ratio Sektor Primer-2 ( $t_{in}$ )	Share Sektor Primer-2 thd PDB ( $S_{in}$ )	Pertumbuhan $S_{in}$ ( $\Delta S_{in}$ )	Pertumbuhan $t_{in}$ ( $\Delta t_{in}$ )	$\sum t_{in} = (t_{in} \times \Delta S_{in}) + (S_{in} \times \Delta t_{in})$
2004	23.41	8.94			
2005	22.73	11.14	0.25	-0.03	5.27
2006	26.41	10.98	(0.01)	0.16	1.39
2007	23.37	11.15	0.02	-0.12	(0.91)
2008	28.76	10.94	(0.02)	0.23	1.98
2009	16.87	10.56	(0.03)	-0.41	(4.95)
2010	12.85	11.18	0.06	-0.24	(1.91)
2011	13.16	11.84	0.06	0.02	1.06

Sumber : Hasil penghitungan

Berdasarkan hasil sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2 bahwa dalam periode 2005-2011 tersebut sebagian besar pertumbuhan penerimaan pajak lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDB. Dalam penelitian ini, angka *tax burden ratio* hanya memperhitungkan penerimaan pajak dan tidak memasukkan unsur Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), misalnya penerimaan dalam bentuk royalti.

#### 4.1.2. Sektor Sekunder

Sektor manufaktur merupakan komponen penggerak perekonomian nasional dan memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Produk-produk yang dihasilkan oleh industri manufaktur selalu memiliki nilai tukar (*terms of trade*) yang tinggi dan menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sektor lain. Untuk itu seharusnya sektor manufaktur dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian. Tetapi perkembangan sektor sekunder masih belum memuaskan yang terlihat dari memburuknya kinerja ekspor serta meningkatnya angka impor.

Athukorala (2006) berpendapat bahwa faktor utama memburuknya kinerja ekspor bukan disebabkan faktor permintaan (*demand side*) melainkan sisi penawaran (*supply side*) atau dapat dikatakan bahwa terdapat persoalan kinerja ekonomi domestik yang berdampak pada rendahnya produktivitas produk ekspor Indonesia. Adji (1996) menyatakan bahwa rendahnya daya saing sektor industri ini khususnya pada sektor manufaktur tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kebijakan yang ditempuh pemerintah yang menyebabkan sektor industri manufaktur di Indonesia memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi pada beberapa perusahaan (oligopolistik). Hal tersebut menciptakan *market power* bagi perusahaan oligopolis yang pada akhirnya akan merugikan konsumen karena berhubungan dengan penetapan harga yang tidak kompetitif.

Salah satu kebijakan yang perlu dilihat adalah pembebanan pajak pada sektor ini. Untuk itu, analisis dilakukan atas pembagian dua sektor, yakni industri pengolahan migas dan industri pengolahan non-migas. Hasil penghitungan industri pengolahan migas terlihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.

**Tabel 4.3.** Hasil Penghitungan Sektor Sekunder-2 (Industri Pengolahan Migas)

Tahun	Tax Burden Ratio Sektor Manufaktur-1 ( $t_{in}$ )	Share Sektor Manufaktur-1 terhadap PDB ( $S_{in}$ )	Pertumbuhan $S_{in}$ ( $\Delta S_{in}$ )	Pertumbuhan $t_{in}$ ( $\Delta t_{in}$ )	$\sum t_n = (t_n \times \Delta S_{in}) + (S_{in} \times \Delta t_{in})$
2004	0.42	4.11			
2005	0.39	4.99	0.22	-0.06	(0.22)
2006	0.39	5.15	0.03	0.00	0.03
2007	0.49	4.61	(0.10)	0.26	1.13
2008	0.53	4.80	0.04	0.08	0.41
2009	9.95	3.74	(0.22)	17.73	64.16
2010	17.22	3.33	(0.11)	0.73	0.54
2011	18.78	3.41	0.02	0.09	0.74

Sumber : Hasil penghitungan

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada periode 2009 – 2011 yang menunjukkan adanya intensifikasi pemungutan pajak pada sektor ini. Sementara itu, *share* sektor industri pengolahan migas justru menunjukkan *trend* penurunan. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDB.

Hal yang serupa juga terjadi terhadap *share* sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB, yang terus mengalami penurunan. Walaupun demikian, *tax burden ratio* masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang paling mudah untuk dilakukan pemungutan pajaknya. Hasil penghitungan sektor industri pengolahan non-migas dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

**Tabel 4.4.** Hasil Penghitungan Sektor Sekunder-2 (Industri Pengolahan Non-Migas)

Tahun	Tax Burden Ratio Sektor Manufaktur-2 ( $t_{in}$ )	Share Sektor Manufaktur-2 terhadap PDB ( $S_{in}$ )	Pertumbuhan $S_{in}$ ( $\Delta S_{in}$ )	Pertumbuhan $t_{in}$ ( $\Delta t_{in}$ )	$\sum t_{in} = (t_{in} \times \Delta S_{in}) + (S_{in} \times \Delta t_{in})$
2004	13.89	23.96			
2005	14.58	22.42	(0.06)	0.05	0.18
2006	12.32	22.38	(0.00)	-0.16	(3.50)
2007	12.69	22.43	0.00	0.03	0.71
2008	13.18	23.01	0.03	0.04	1.22
2009	11.33	22.61	(0.02)	-0.14	(3.37)
2010	13.25	21.51	(0.05)	0.17	3.01
2011	13.70	20.91	(0.03)	0.03	0.33

Sumber : Hasil penghitungan

Berdasarkan hasil penghitungan pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak dibandingkan dengan pertumbuhan PDB terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2006 dan 2009. Dengan demikian, pertumbuhan penerimaan pajak tetap lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDB.

#### 4.1.3. Sektor Tersier

Walaupun masih tingginya kendala yang dialami pada sektor primer dan sekunder, tetapi Indonesia termasuk negara yang melakukan transformasi dan menjadikan sektor tersier memiliki peranan terbesar terhadap PDB (Felipe 2013). Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009, maka sektor tersier ini terdiri dari sektor listrik, gas dan air bersih; sektor konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa lainnya. Dan hasil penghitungan industri sektor tersier dapat dilihat pada Tabel 4.5. berikut ini :

**Tabel 4.5.** Hasil Penghitungan Industri Sektor Tersier

Tahun	Tax Burden Ratio Sektor Tersier ( $t_{in}$ )	Share Sektor Tersier terhadap PDB ( $S_{in}$ )	Pertumbuhan $S_{in}$ ( $\Delta S_{in}$ )	Pertumbuhan $t_{in}$ ( $\Delta t_{in}$ )	$\sum t_{in} = (t_{in} \times \Delta S_{in}) + (S_{in} \times \Delta t_{in})$
2004	9.11	48.66			
2005	9.35	48.33	(0.01)	0.03	1.20
2006	9.46	48.51	0.00	0.01	0.61
2007	10.19	48.08	(0.01)	0.08	3.65
2008	10.35	46.77	(0.03)	0.02	0.46
2009	9.47	47.79	0.02	-0.08	(3.85)
2010	9.09	48.83	0.02	-0.04	(1.77)
2011	9.07	49.09	0.01	0.00	(0.06)

Sumber : Hasil penghitungan

Berdasarkan hasil penghitungan pada Tabel 4.5 terlihat adanya kontradiksi antara pertumbuhan *share* sektor industri tersier terhadap PDB dengan pertumbuhan penerimaan pajak dibandingkan dengan pertumbuhan PDB. Pada periode 2004-2008 terdapat penurunan *share* sektor industri tersier

terhadap PDB tetapi diikuti kenaikan dengan pertumbuhan penerimaan pajak dibandingkan dengan pertumbuhan PDB. Hal yang sebaliknya terjadi dalam kurun waktu 2009 - 2011. Kenaikan *share* sektor industri tersier terhadap PDB malah diikuti penurunan pertumbuhan penerimaan pajak dibandingkan dengan pertumbuhan PDB. Hal tersebut mengakibatkan secara keseluruhan terdapat penurunan kinerja pemungutan pajak pada sektor ini, yaitu pada periode 2009-2011, pertumbuhan penerimaan pajak lebih lambat dibandingkan pertumbuhan PDB.

#### 4.2. Ihtisar Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penghitungan pada Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.5 maka dapat dilakukan ikhtisar pertumbuhan penerimaan pajak dibandingkan dengan pertumbuhan PDB untuk seluruh sektor industri sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.6. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat pertumbuhan setiap sektor maupun seluruh sektor.

**Tabel 4.6.** Pertumbuhan Penerimaan Pajak per Sektor

Tahun	$\Sigma$ Sektor Primer	$\Sigma$ Sektor Sekunder	$\Sigma$ Sektor Tersier	$\Sigma$ Seluruh Sektor
2005	4.22	-0.10	1.20	5.31
2006	3.68	-4.35	0.61	-0.06
2007	-3.04	1.22	3.65	1.83
2008	4.82	1.32	0.46	6.60
2009	-11.31	-0.26	-3.85	-15.41
2010	-5.46	5.13	-1.77	-2.11
2011	2.22	0.81	-0.06	2.98

Sumber : Hasil penghitungan

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia bersifat fluktuatif terhadap pertumbuhan PDB. Pada tahun 2005, 2007, 2008 dan 2011 pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PDB sedangkan tahun 2006, 2009 dan 2010 justru terjadi sebaliknya, pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan PDB. Pada tahun 2009 terjadi penurunan pertumbuhan yang sangat besar, meskipun pada tahun tersebut penerimaan pajak mencapai target sebagaimana disebutkan dalam APBN. Dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, tercatat hanya pada tahun 2004 dan 2009 penerimaan pajak mencapai target. Untuk itu, telah dilakukan perbandingan pertumbuhan nilai nominal PDB dan pertumbuhan penerimaan pajak sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7.** Perbandingan Pertumbuhan PDB dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak (nominal)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TR growth (x)	22.11%	19.60%	21.07%	29.56%	0.08%	15.14%	17.62%	17.88%
PDB growth (y)	20.84%	20.36%	18.55%	25.25%	13.29%	14.81%	15.39%	12.65%
	x > y	x < y	x > y	x > y	x < y	x > y	x > y	x > y

Sumber : APBN, BPS, DJP, diolah

Hasil penghitungan pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan PDB terjadi pada tahun 2006 dan 2009. Bahkan pada tahun 2009 pertumbuhan penerimaan pajak jauh lebih buruk dibandingkan pertumbuhan

PDB. Hal ini kurang lebih sesuai dengan penghitungan pada Tabel 4.6 kecuali pada tahun 2010. Untuk mengetahui alasan penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2009 perlu dilakukan elaborasi lebih lanjut

#### 4.3. Insentif Pajak bagi Industri Manufaktur

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, *share* sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDB terus mengalami penurunan, tetapi *macro tax burden ratio* malah menunjukkan kenaikan atau secara keseluruhan, pertumbuhan penerimaan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB. Sektor manufaktur menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia dengan kontribusi lebih dari 35% meskipun kontribusi industri manufaktur hanya menyumbang kurang lebih sebesar 25% terhadap PDB. Hal ini membuat banyak pihak menyarankan pemerintah untuk memberikan insentif pajak mengingat peranan sektor ini sebagai penggerak perekonomian nasional. Sektor ini berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan melalui nilai tambah tinggi, penciptaan lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi struktural bangsa ke arah modernisasi.

Pro-kontra pemberian fasilitas perpajakan masih terus berlangsung, salah satu pihak merasa keberatan, karena fasilitas itu mengingkari prinsip netralitas, efisiensi dan keadilan sedangkan pihak lain yang pro menyatakan positif untuk merangsang minat investor, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mendorong ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak. Berbagai variabel tersebut tentunya menjadi pertimbangan dalam pemberian insentif pajak dan dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini.

**Tabel 4.8.** Variabel dalam Pemberian Insentif Pajak

Sub Sektor Industri Pengolahan	Share thd PDB	Tax Burden Ratio	Nilai Tambah Bruto	Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah Pelaku Usaha	Insentif Pajak
Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	7.03%	12.06%	25.60%	20.60%	28.03%	24.74%
Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2.32%	4.74%	9.59%	27.44%	22.36%	20%
Industri Kayu dan Produk Lainnya	1.30%	1.89%	1.65%	5.97%	5.30%	0%
Industri Produk Kertas dan Percetakan	1.09%	13.39%	6.12%	3.57%	4.15%	50.00%
Industri Produk Pupuk, Kimia dan Karet	2.79%	21.58%	19.14%	12.65%	11.75%	30.91%
Industri Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam	0.80%	17.15%	3.76%	4.61%	6.93%	3.03%
Industri Logam Dasar Besi dan Baja	0.54%	40.66%	3.45%	1.70%	1.10%	100%
Industri Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Transportasi	6.18%	13.01%	28.26%	17.20%	10.49%	47.27%
Produk Industri Pengolahan Lainnya	0.18%	21.24%	2.12%	6.07%	9.56%	0%

Sumber : APBN, BPS, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, diolah

Pemerintah Indonesia juga menerapkan pemberian insentif pajak dengan pendekatan sub-sub sektor industri. Insentif pajak sebagaimana terlihat pada kolom terakhir Tabel 4.8 merupakan insentif pajak penghasilan dalam bentuk *tax allowance* dan *tax holiday* sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 dan PMK Nomor 130/PMK.011/2011. Hasil penghitungan diperoleh dengan membagi jumlah sub sektor yang memperoleh insentif pajak penghasilan dibagi dengan jumlah seluruh subsektor dalam satu kelompok klasifikasi lapangan usaha. Misalkan kelompok klasifikasi lapangan usaha industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki terdapat 50 subsektor dan hanya 10 yang mendapatkan insentif pajak penghasilan. Dengan demikian terdapat kelompok klasifikasi lapangan usaha yang seluruh sub-sub sektornya memperoleh fasilitas insentif fiskal (industri logam dasar besi dan baja), tetapi juga terdapat kelompok yang sama sekali tidak memperoleh fasilitas tersebut, yakni industri kayu dan produk lainnya serta produk industri pengolahan lainnya). Bahkan kelompok industri kayu dan produk lainnya mendapatkan disinsentif fiskal dengan pemberlakuan larangan ekspor rotan dalam bentuk mentah (bahan baku).

Sementara itu, nilai *share* terhadap PDB dan *tax burden ratio* merupakan hasil penghitungan rata-rata untuk periode 2004 – 2011. Nilai tambah bruto, penyerapan tenaga kerja dan jumlah pelaku usaha merupakan perbandingan setiap sub sektor industri dengan kontribusi yang diberikan oleh industri manufaktur. Berdasarkan hasil pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa industri makanan, minuman dan tembakau serta industri peralatan, mesin dan transportasi menunjukkan seluruh variabel cukup penting kontribusinya dalam industri manufaktur jika diperbandingkan antara *share* terhadap PDB, *tax burden ratio*, nilai tambah bruto, penyerapan tenaga kerja dan jumlah pelaku usaha.

Berdasarkan penghitungan sebagaimana dilakukan pada bagian 1 diatas, maka juga dilakukan penghitungan perbandingan pertumbuhan PDB dengan pertumbuhan penerimaan pajak sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.9. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa beberapa sektor yang mendapatkan fasilitas insentif cukup luas (terutama sektor industri logam dasar besi dan baja), tetapi *share* terhadap PDB, nilai tambah bruto, penyerapan tenaga kerja dan jumlah pelaku usaha relatif kecil. Bahkan sektor tersebut juga mengalami penurunan pertumbuhan penerimaan pajak yang cukup besar pada tahun 2010 dan 2011, meskipun *tax burden ratio*-nya masih sangat tinggi. Sementara itu, sektor industri kayu dan produk kayu lainnya menunjukkan kelesuan usaha yang bersifat kronis yang ditandai dengan rendahnya nilai seluruh variabel yang diperbandingkan pada Tabel 4.8.

**Tabel 4.9.** *Tax Burden Ratio* ( $\sum t_n$ ) Subsektor Industri Pengolahan

Subsektor Industri Pengolahan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	-0.91	-0.28	0.91	-0.06	0.22	-0.07	0.37
Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-0.53	-0.21	-0.55	-0.23	-0.39	-0.11	0.09
Industri Kayu dan Produk Lainnya	-0.01	-0.09	-0.06	-0.09	-0.28	-0.05	1.84
Industri Produk Kertas dan Percetakan	-1.34	-0.54	-0.37	-1.11	0.30	-0.68	-1.13
Industri Produk Pupuk, Kimia dan Karet	-0.40	0.20	0.01	2.17	-1.58	-0.76	-1.35
Industri Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam	-0.61	-0.22	-0.64	-0.30	-0.77	-1.98	-0.69
Industri Logam Dasar Besi dan Baja	-1.93	-2.16	-2.31	1.14	-8.00	-6.09	0.32
Industri Peralatan, Mesin dan PerlengkapanTransportasi	-0.14	-2.08	0.20	0.96	-1.89	1.78	-0.33
Produk Industri Pengolahan Lainnya	-1.58	0.41	-1.73	-0.62	-0.81	-1.14	-1.16

Sumber : APBN, BPS, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian diolah

Hasil penghitungan sebagaimana dilihat pada Tabel 4.9 bisa mengakibatkan multi intpretasi sehingga diperlukan suatu kajian yang lebih komprehensif. Hampir seluruh sub sektor industri pengolahan menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak yang relatif lebih rendah dapat menggambarkan

adanya *trend* penurunan kinerja industri pengolahan Indonesia yang ditunjukkan dengan menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB. Keluarnya berbagai bentuk insentif pajak penghasilan juga dapat mengakibatkan rendahnya pertumbuhan penerimaan pajak meskipun hal tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut.

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

### 5.1. Kesimpulan

Korelasi pertumbuhan PDB dengan pertumbuhan penerimaan pajak seharusnya bersifat positif (yaitu kenaikan PDB akan diikuti kenaikan penerimaan pajak), tetapi percepatannya tidak selalu sama. Sektor primer dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 26% memiliki karakteristik yang unik. Sektor pertanian memiliki *tax burden ratio* yang sangat kecil. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian memiliki *tax burden ratio* yang besar meskipun terus menurun sangat drastis dalam periode 2009-2011. Akan tetapi, secara keseluruhan pertumbuhan penerimaan pajak sektor primer masih lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PDB.

Sektor sekunder, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 25%, menunjukkan hal yang sebaliknya. Sektor ini termasuk yang menanggung *tax burden ratio* cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan, sebagian besar pertumbuhan penerimaan pajak sektor primer lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan PDB. Hal yang sebaliknya justru terjadi pada sektor tersier yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB sebesar 49%. Secara keseluruhan, terdapat penurunan kinerja pemungutan pajak pada sektor ini, yaitu pada periode 2009-2011, pertumbuhan penerimaan pajak lebih lambat dibandingkan pertumbuhan PDB.

Hasil penghitungan atas ketiga sektor tersebut menghasilkan suatu grafik yang bersifat fluktuatif. Dalam kurun waktu 2005 - 2011, pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PDB untuk tahun 2005, 2007, 2008 dan 2011. Sedangkan tahun 2006, 2009 dan 2010 justru terjadi sebaliknya, pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan PDB. Hal tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi kinerja pemungutan pajak di Indonesia. Kelemahan terbesar adalah sektor tersier sebagai penyumbang kontribusi terbesar terhadap PDB menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan PDB, terutama pada periode 2009-2011.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya *trend* penurunan kinerja industri manufaktur, tetapi masih yang menanggung *tax burden ratio* cukup tinggi. Untuk meningkatkan investasi dan menggairahkan sektor industri manufaktur, maka pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif pajak yang diperuntukkan sektor-sektor industri manufaktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat dua subsektor industri, yaitu industri makanan, minuman dan tembakau serta industri peralatan, mesin dan transportasi yang menunjukkan seluruh variabel cukup penting kontribusinya dalam industri manufaktur jika diperbandingkan antara *share* terhadap PDB, *tax burden ratio*, nilai tambah bruto, penyerapan tenaga kerja dan jumlah pelaku usaha. Hasil penghitungan juga menyimpulkan bahwa sebagian besar pertumbuhan penerimaan pajak sektor industri manufaktur lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan PDB. Beberapa sektor yang mendapatkan fasilitas insentif cukup luas (terutama sektor industri logam dasar besi dan baja), tetapi *share* terhadap PDB, nilai tambah bruto, penyerapan tenaga kerja dan jumlah pelaku usaha relatif kecil. Bahkan sektor tersebut juga mengalami penurunan pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2010 dan 2011. Sementara itu, sektor industri kayu dan produk kayu lainnya menunjukkan kelesuan usaha yang bersifat kronis yang ditandai dengan rendahnya nilai seluruh variabel yang diperbandingkan.

## 5.2. Rekomendasi Kebijakan

Mengingat bahwa pemberian berbagai bentuk insentif pajak dapat mengakibatkan rendahnya pertumbuhan penerimaan pajak tetapi dalam beberapa terakhir masih menunjukkan *trend* penurunan kinerja industri manufaktur Indonesia. Untuk itu, direkomendasikan untuk diberikan insentif pajak langsung diberikan kepada tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, jika bertujuan untuk menyerap tenaga kerja, maka perlu diberikan kepada sub-sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau; industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki serta industri peralatan, mesin dan perlengkapan transportasi. Sementara itu, untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi dapat diberikan insentif pajak untuk sub-sub sektor makanan, minuman dan tembakau serta industri peralatan, mesin dan perlengkapan transportasi yang menunjukkan keberhasilan. Mengingat sub-sub sektor dibagi lagi menjadi 421 klasifikasi, maka perlu dilakukan elaborasi lebih lanjut untuk menunjukkan insentif pajak yang sangat tepat sasaran.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adji D.A. (1996). *Industrial Concentration and Price Adjustment : Indonesia Case Study*. Kelola No. 12/V/96.
- Asafu-Adjaye, J. (2000). The Effect of Foreign Direct Investment on Indonesian Economic Growth, 1970-1996, *Economic Analysis and Policy*, Vol. 30 No. 1
- Athurokala, P. (2006). Post-Crisis Export Performance : The Indonesian Experience in Regional Perspective. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol.42 No.2, pp. 177-211
- Arnold, J. (2013). Improving The Tax System in Indonesia, *OECD Economic Department, Working Paper No. 998*, OECD : Paris
- Badan Kebijakan Fiskal. (2013). *Indikator Terkini Ekonomi Makro*
- Bird, R.M., Martinez-Vazquez, J. dan Torgler, B. (2008). Tax Effort in Developing Countries and High Income Countries: The Impact of Corruption, Voice and Accountability, *Economic Analysis and Policy*, Vol. 38 No. 1
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2011). *Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). *Buku Saku Pajak dalam Angka Tahun 2002-2010*
- Desai, A.M., Foley, C.F., dan Hines, J.R. (2004). Foreign Direct Investment and the Domestic Capital Stock. *National Bureau Economic Research (NBER) Working Paper No. 11075*
- Downing, M. (2004). Incentives for Economic Development. *Economic Development Journal* Vol. 3 (2) : 73-85
- Easson, A., & Zolt, E.M. (2003). *Tax Incentives*. Modul dipresentasikan pada Course on Practical Issues of Tax Policy in Developing Countries, 28 April – 1 Mei 2003, Washington D.C, USA : World Bank
- Fahmi, M.R. (2012). Analyzing the Relationship between Tax Holiday and Foreign Direct Investment in Indonesia. Tesis, Ritsumeikan Asia Pacific University. Japan
- Felipe, J. (2013). *Asia's Economic Transformation : Where to, How and How Fast*, Asian Development Bank.
- Fletcher, K. (2002). Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR, and Vietnam. IMF Conference on Foreign Direct Investment : Opportunities and Challenges for Cambodia, Lao PDR, and Vietnam, 16-17 Agustus 2002, Vietnam
- Gacanja, E.W. (2012). *The Tax Revenue and Economic Growth: An Empirical Case Study of Kenya*. MBA Project, University of Nairobi.
- Gordon, R. dan Li, W. (2005). Tax Structures in Developing Countries: Many Puzzles and a Possible Explanation. *National Bureau Economic Research (NBER) Working Paper No. 11267*, USA
- Grubert, H. and Mufti, J. (1991). Taxes, Tariffs and Transfer Pricing in Multinational Corporate Decision Making. *Review of Economics and Statistics* Vol. 72(2), 285-293

- James, S. (2009). *Effectiveness of Investment Incentives in Developing Countries : Evidence and Policy Implications*, Investment Climate Advisory Services, World Bank
- Kementerian Keuangan. (2012). *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004-2011*
- Kementerian Perindustrian. (2014). (<http://www.kemenperin.go.id/statistik/kinerja.php> diakses tanggal 16 Juli 2014)
- Klemm, A. dan Van Parys, S. (2012). Empirical evidence on the effects of tax incentives. *International Tax and Public Finances DOI 10.1007/s 10797-011-9194-8*
- Krugman, P. (2000). *International Economics, Theory and Policy*. Addison-Wesley Publishing Company. USA
- Martinez-Vazquez, J. (2001). Mexico: An Evaluation of the Main Features of the Tax System, *International Studies Program Working Paper 01-12*, Atlanta, Georgia, Andrew Young School of Policy Studies, November.
- Mooij, R.A dan Enderveen, S. (2009). Taxation and Foreign Direct Investment: A Synthesis of Empirical Research. *CESifo Working Paper No 558*
- Rolfe, R.J. dan White, R.A. (1990). The influence of tax incentives in determining the location of foreign direct investment in developing countries, *Journal of the American Taxation Association* Vol. : 13 (2), 39-57
- Tung, S. dan Co, S. (2000). The Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment in China. *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*, Vol. 9(2) : 105-135
- Uppal, J.S. 1986. *Taxation in Indonesia*. Gajah Mada. University Press
- Watada, J., Wu, B. dan Xu, B. (2014). *Innovative Management in Information and Production*. Springer Science and Business Media, New York
- Wells, L.T. (2001). *Using tax incentives to compete for foreign investment: are they worth the costs?* The International Finance Corporation and The World Bank
- World Bank, Data of Tax Revenue (%GDP). (2014). (<http://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS?page=4> diakses 17 Juli 2014)
- Yi, F. & Suyono E. (2013). Tax Revenue and Economic Growth of China: Test and Correction of the Tax Multiplier Effect. Paper dipresentasikan pada 3rd Asia-Pacific Business Research Conference 25 - 26 February 2013, Kuala Lumpur, Malaysia

